

## ABSTRAK

Wansan (01656170004)

### **ANALISIS YURIDIS PEMBATALAN SERTIFIKAT HAK MILIK YANG PERALIHANNYA TELAH DIDASARI AKTA JUAL BELI**

(viii + 80 halaman)

Dewasa ini, seringkali muncul berbagai masalah dalam bidang pertanahan yang dikarenakan adanya keinginan dari berbagai pihak untuk memperoleh kepemilikan hak-hak atas tanah, Tak jarang keinginan untuk memperoleh hak atas tanah tersebut direalisasikan melalui cara yang melanggar hukum, salah satunya dalam Putusan Nomor 24/G/2017/PTUN-BL yang membatalkan Sertifikat Hak atas Tanah yang pada pokoknya pembatalan tersebut terjadi karena adanya Akta Jual-Beli yang tidak diketahui oleh Pemilik Tanah. Untuk melihat apakah penerapan hukum sudah tepat dalam penyelesaian sengketa tanah ini, diperlukan penelitian mengenai pembatalan sertifikat hak milik yang peralihannya didasari akta jual beli otentik yang dibuat dihadapan PPAT. Penelitian ini menggunakan pendekatan undang-undang dan pendekatan kasus. Dari penelitian tersebut, dapat disimpulkan bahwa Pembatalan Sertifikat Hak Milik Nomor 646 atas nama A. Ruyanti akibat tidak sesuai dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria *jo.* Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, karena Kantor Pertanahan telah melakukan penerbitan sesuai prosedur. Pembatalan hak seharusnya diajukan ke Pengadilan Negeri dengan Tergugat A. Ruyanti.

Kata kunci: Pembatalan Sertifikat Hak Atas Tanah, Hukum Agraria, Sengketa Tanah

Referensi: 29 (1987-2016)

## **ABSTRACT**

Wansan (01656170004)

### ***LEGAL ANALYSIS ON THE ANNULMENT OF RIGHT OF OWNERSHIP CERTIFICATE WHICH TRANSFER OF RIGHT IS BASED ON SALE AND PURCHASE DEED***

(viii + 80 pages)

*Nowadays, there are often various problems in the field of land due to the desire of various parties to obtain ownership of land rights. In many cases, the desire to obtain rights to land is realized through ways that violate the law, one of them in Decision Number 24/G/2017/PTUN-BL which cancels the Land Rights Certificate because of the Sale and Purchase Act which was unknown to the Land Owner. To see whether the application of the law is correct in resolving this land dispute, research is needed on the cancellation of the certificate of property rights whose transition is based on an sale and purchase deed. This study uses legal approach and case approach. From the research, it can be concluded that the cancellation of ownership rights number 646 in the name of A. Ruyanti due to not in accordance with Law Number 5 of 1960 concerning Basic Regulations on Agrarian Principles jo. Government Regulation Number 24 of 1997 concerning Land Registration, because the Land Office has issued according to the procedure. Cancellation of rights should be submitted to the District Court with Defendant A. Ruyanti.*

*Keywords: Cancellation of Land Rights Certificate, Agrarian Law, Land Disputes.*

*Reference: 29 (1987-2016)*